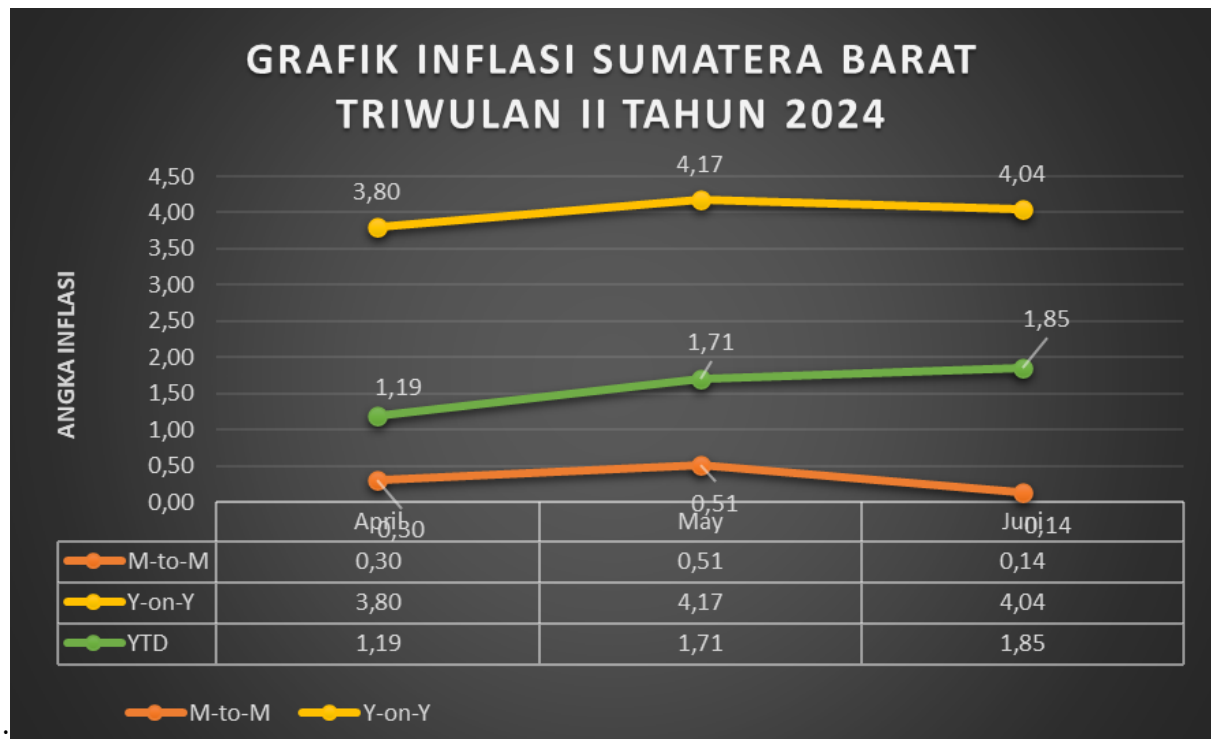


1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Perkembangan inflasi Provinsi Sumatera Barat pada Triwulan II Tahun 2024, sebagai berikut :

1. Inflasi April 2024, Sumatera Barat tercatat deflasi sebesar 0,30% (mtm) turun dibanding bulan sebelumnya Maret sebesar 0,64% (mtm). Secara bulanan Sumatera Barat mengalami deflasi yang disumbang dari kelompok makanan, minuman dan tembakau, serta kelompok transportasi, dengan komoditas penyumbang adalah Bawang merah, angkutan udara, emas perhiasan, angkutan antar kota, kentang, Sigaret Kretek mesin (SKM), Tarif kendaraan travel, nasi dengan lauk, udang basah dan kendaraan carter/rental. Sedangkan secara tahunan inflasi April 2024 sebesar 3,81% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan realisasi inflasi Maret 2024 sebesar 3,93% (yoy).
2. Inflasi bulan Mei sebesar 0,51% (month to month), sedikit meningkat dibanding realisasi inflasi bulan April 2024 0,30%. Adapun komoditi penyumbang inflasi bulanan adalah cabe merah, bawang merah, beras, emas perhiasan, daging ayam ras, sewa rumah, gula pasir, kopi bubuk dan terong. Sedangkan secara tahunan inflasi Mei 2024 sebesar 4,17% (yoy), meningkat dibandingkan dengan realisasi inflasi April 2024 yang sebesar 3.81% (yoy).
3. Inflasi bulan Juni sebesar 0,14% (mtm) turun dibanding inflasi bulan sebelumnya yakni sebesar 0,51% (mtm). Inflasi bulan Juni di dorong oleh kenaikan harga beberapa bahan komoditi pangan seperti cabe merah, beras, angkutan udara, cabai rawit, Sigaret Kretek tangan, sewa rumah, pepaya, sigaret kretek mesin, wortel dan buncis. Sedangkan inflasi tahunan pada Juni 2024 sebesar 4.04% (yoy) sedikit menurun dibanding bulan sebelumnya yakni sebesar 4.17% (yoy).

Secara bulanan, Berikut fluktuasi inflasi Sumatera Barat pada Triwulan II tahun 2024 dapat dilihat pada grafik dibawah ini, baik secara bulanan, tahunan dan year to date, sebagai berikut



2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

- Selama triwulan II realisasi inflasi Sumatera Barat sangat berfluktuasi dengan komoditi penyumbang inflasi antara lain beras, cabe merah, bawang merah, cabe rawit dan daging ayam ras. Penyebab inflasi pada triwulan II didorong oleh kenaikan harga beberapa bahan komoditi pangan terutama beras, cabai merah, bawang merah, cabe rawit dan daging ayam ras.
- Peningkatan harga beras disebabkan terbatasnya pasokan seiring dengan telah berakhirnya musim panen sejalan dengan permintaan masyarakat yang mengalami peningkatan. Selain itu, terbatasnya pasokan juga disebabkan karena penurunan produksi akibat bencana alam yang terjadi pada beberapa waktu lalu, petani gagal tanam dan sejumlah areal pertanian yang rusak. Sama halnya untuk komoditi lain seperti cabe dan bawang merah dimana daerah sentra produksi terkena bencana alam seperti Agam, Tanah Datar dan Kab. Solok.
- Bencana alam yang terjadi mengakibatkan jalur distribusi terhambat karena terdapat beberapa titik jalur distribusi (jalan raya) penghubung lintas Kabupaten dan Kota terputus sehingga jarak tempuh pengangkutan bahan pangan lebih lama dan biaya yang ditimbulkan mengalami peningkatan.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Berbagai kegiatan yang dilaksanakan dan diikuti pada Triwulan II tahun 2024 diantaranya rapat koordinasi teknis pengendalian inflasi, mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi mingguan yang difasilitasi oleh Kemendagri dan beberapa kegiatan lainnya seperti Koordinasi dengan Bank Indonesia dan lembaga vertikal lainnya, Koordinasi dengan OPD teknis terkait

dan koordinasi sesama tim TPID provinsi maupun TPID Kab Kota dan stakeholder terkait. Bencana alam yang terjadi di Sumatera Barat pada periode Triwulan II sangat tidak berpihak terhadap penanganan pengendalian inflasi di Sumatera Barat karna mengakibatkan banyaknya lahan pertanian yang rusak sehingga gagal tanam dan gagal panen, kerusakan pada jaringan infrastruktur seperti kerusakan pada jaringan irigasi dan jalan sebagai jalur distribusi bahan pangan dari satu kabupaten ke Kabupaten lainnya. Kerusakan lahan dan jalan mengakibatkan lonjakan harga pada beberapa komoditi pangan di Sumatera Barat seperti : beras, cabe merah dan bawang merah yang mengakibatkan realisasi inflasi Sumatera Barat melebihi realisasi inflasi nasional dan bahkan Provinsi Sumatera Barat pada Juni 2024 termasuk 10 (sepuluh) besar provinsi dengan realisasi inflasi tertinggi.

Selanjutnya, akibat bencana alam terjadi perubahan jumlah prognosa produksi dan prognosa ketersediaan yang telah disusun, dimana terjadi defisit produksi dan defisit ketersediaan sehingga dalam memenuhi kekurangannya dilakukan koordinasi dengan daerah lain untuk dapat memasok kekurangan sehingga kebutuhan untuk wilayah Sumatera Barat dapat terpenuhi.

Sumatera Barat yang merupakan daerah sentra produksi pertanian dan Hortikultura, Kementerian Pertanian menyerahkan bantuan senilai Rp. 33,34milyar yang terdiri dari Rp. 7,4 miliar untuk Tanaman Hortikultura, Rp. 5,6 miliar untuk sapsras pertanian dan Rp. 20 miliar untuk Tanaman Pangan yang sekaligus penandatanganan kerjasama terkait program tani mahasiswa antara Kementerian Pertanian dengan kelompok tani mahasiswa. Diharapkan bantuan ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh OPD teknis terkait sehingga triwulan berikutnya produksi tanaman pangan di daerah sentra produksi dapat tersedia sesuai dengan prognosa yang di susun. Selain itu, dalam memenuhi kebutuhan bibit kiranya dapat berkoordinasi dengan Bank Indonesia dan subsidi ongkos angkut dengan Badan Pangan nasional.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi melakukan evaluasi secara bersama dan berkala terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Pengendalian Inflasi yang sudah ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Nomor 500-292 -2024 tentang Rencana Aksi Pengendalian Inflasi Daerah Sumatera Barat Tahun 2024 tanggal tanggal 5 April 2024, yang dilaksanakan oleh OPD terkait.
2. Setiap selesai pelaksanaan High Level Meeting dan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi daerah selalu merumus kebijakan pengendalian inflasi sesuai dengan permasalahan yang sedang dihadapi dalam pengendalian inflasi.
3. OPD terkait di Provinsi menindaklanjuti kebijakan pengendalian inflasi yang disampaikan oleh Kementerian terkait setiap pelaksanaan Rapat Pengendalian Inflasi mingguan bersama Kemendagri.
4. Pelaksanaan pengendalian inflasi memenuhi aspek 4 K , diantaranya :
5. **Keterjangkauan Harga**
 - Tetap Melaksanakan kegiatan pasar murah secara masif.
 - Tetap melaksanakan kegiatan pemantauan harga dan pasokan (sidak pasar).
 - Tetap berkoordinasi dengan Bulog untuk penyelenggaraan SPHP serta operasi pasar rutin untuk komoditas beras, minyak goreng dan gula pasir.

Tetap Monitoring perkembangan harga bapokting secara rutin harian oleh Disperindag di semua Kab/Kota se Sumbar.

1. Ketersediaan Pasokan

- Melakukan sidak pasar secara rutin dan berkala.
- Mendorong opd terkait untuk melakukan pemetaan produksi, ketersediaan dan kebutuhan pangan.
- Mendorong Dinas pertanian untuk melakukan cetak sawah baru, perbaikan irigasi dan program pompanisasi untuk mengairi sawah.
- Menambah wilayah untuk championship cabe dan bawang merah.
- Menyiapkan benih cabe untuk pelaksanaan gerakan menanam cabe di polybag.
- Menyiapkan lahan baru untuk peningkatan produksi jagung.
- Mengoptimalkan kerjasama perdagangan bahan pangan dengan Provinsi penghasil komoditi pangan, seperti cabe merah dan bawang merah.

1. Kelancaran Distribusi

- Pendistribusian beras SPHP dan stok pangan komersil oleh Bulog.
- Intensifikasi distribusi komoditas pangan strategis oleh Toko Tani Indonesia Center (TTIC).
- Pengawasan jalur distribusi dan akses logistic dalam memastikan terpenuhinya kebutuhan masyarakat Sumatera Barat.
- Optimalisasi KAD antar dan intra daerah surplus ke daerah defisit.
- Percepatan perbaikan infrastruktur jalan untuk kelancaran dan efisiensi pasokan distribusi bahan pangan pokok.
- Fasilitasi distribusi pangan dan supply pangan strategis pemicu inflasi terutama ke Kabupaten/Kota yang menjadi perhitungan inflasi.

1. Komunikasi Efektif

- Melaksanakan kegiatan *High Level Meeting* TPID se Sumatera Barat.
- Melaksanakan Kegiatan Rapat Koordinasi TPID.
- Melaksanakan kegiatan pengendalian inflasi sesuai Rencana Aksi pengendalian Inflasi Tahun 2024.
- Melaksanakan operasi pasar melalui mobil box oleh TTIC.
- Menerbitkan keputusan Gubernur Nomor 500-95-2024 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Prov Sumatera Barat Tahun 2024.
- Menerbitkan keputusan Gubernur Nomor 500-292-2024 tentang Rencana Aksi Pengendalian Inflasi Daerah Prov Sumatera Barat Tahun 2024.
- Pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis Pengendalian Inflasi.
- Mengikuti rapat koordinasi mingguan pengendalian inflasi secara virtual dengan Kemendagri yang diikuti secara bersama-sama dengan pimpinan dan kepala OPD terkait di Provinsi.
- Diversifikasi keragaman konsumsi bahan pokok alternatif.

◦